



KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KESETARAAN GENDER: ANALISIS BIBLIOMETRIK 2014–2024

Romi Ali Yuliansyah

UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 06 17, 2026

Revised 07 15, 2026

Accepted 08 07, 2026

Kata Kunci:

politik perempuan

Kesetaraan gender

Analisis bibliometrik

Kebijakan afirmatif

Partisipasi politik

Gender dan politik

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan studi mengenai keterlibatan perempuan dalam ranah politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender selama periode 2014–2024. Perhatian terhadap isu ini meningkat seiring dengan menguatnya agenda pembangunan global yang menempatkan kesetaraan gender sebagai tujuan utama. Metode bibliometrik digunakan untuk menelusuri pola publikasi, keterhubungan antar penulis, jangkauan kontribusi wilayah, dan kecenderungan tema penelitian. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data publikasi ilmiah yang terindeks dan dituangkan dalam bentuk visualisasi melalui perangkat analisis bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah karya ilmiah serta perubahan orientasi studi dari keterwakilan yang bersifat simbolis menuju pemberdayaan substantif yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan kontribusi negara berkembang memperluas pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan afirmatif serta hambatan sosial-politik yang dihadapi. Temuan ini memberikan dasar bagi penguatan dukungan lembaga politik dan penerapan pengarusutamaan gender dalam pembuatan kebijakan untuk memperkuat peran perempuan dalam bidang politik ke depan.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



Corresponding Author:

Romi Ali Yuliansyah

UIN Sunan Gunung Djati, FISIP, Administrasi Publik, Bandung, Indonesia.

Email: romialijuliansyah01@gmail.com

PENDAHULUAN

Kehadiran perempuan dalam dunia politik merupakan salah satu ukuran penting bagi kualitas demokrasi dan pembangunan sosial di sebuah negara Menurut (Kumari *et al.*, 2023), partisipasi politik perempuan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang sejauh mana perempuan dapat berperan dalam menentukan arah kebijakan publik. Dalam banyak kasus, keterlibatan perempuan terbukti membawa perspektif yang lebih adil dan inklusif terhadap isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Reeves *et al.*, 2022; Rustagi *et al.*, 2024). Namun, di Indonesia, peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Representasi perempuan di lembaga politik belum mencapai tingkat yang diharapkan, sehingga suara dan kepentingan perempuan sering kali belum terwakili secara proporsional dalam proses pengambilan keputusan.

Upaya untuk memperkuat peran perempuan sebenarnya telah lama menjadi perhatian pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, negara menetapkan ketentuan bahwa partai politik wajib mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan afirmatif ini dirancang untuk memperluas ruang politik bagi perempuan sekaligus memperkuat prinsip kesetaraan gender dalam demokrasi Indonesia. Meskipun secara normatif kebijakan ini sudah berpihak pada perempuan, realisasinya masih jauh dari harapan. Dalam Pemilu 2019, misalnya, keterwakilan perempuan di DPR RI baru mencapai sekitar 21,4 persen (Sibarani, 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif belum sepenuhnya diiringi oleh perubahan budaya dan dukungan struktural yang memadai dari partai politik.

Hambatan terhadap keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya berasal dari sistem dan kebijakan, tetapi

juga dari pandangan sosial yang masih bias gender. Yusartika *et al.* (2023) menjelaskan bahwa budaya patriarki masih kuat melekat dalam kehidupan politik dan masyarakat, sehingga peran perempuan sering dipersepsikan terbatas pada ranah domestik. Di sisi lain, perempuan yang ingin berkarier di politik masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan, dukungan jaringan, serta pelatihan kepemimpinan (Currie-Wood & Pruysers, 2025; Eduardo & Souza, 2021). Partai politik pun belum banyak menyediakan ruang strategis bagi kader perempuan untuk berkembang. Akibatnya, partisipasi politik perempuan kerap bersifat simbolis dan belum benar-benar mampu memengaruhi arah kebijakan publik secara substansial (Darbaidze & Niparishvili, 2024).

Di tingkat global, isu keterwakilan politik perempuan menjadi bagian penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG 5*) yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Berbagai studi menunjukkan bahwa negara dengan representasi perempuan yang tinggi di parlemen cenderung memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Menurut Holman & Mahoney (2018), perempuan yang aktif di ranah politik sering membawa nilai-nilai empati, kolaborasi, dan keberlanjutan dalam kebijakan publik. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran perempuan bukan hanya bentuk partisipasi politik, tetapi juga kebutuhan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan adil.

Sejumlah penelitian lain mengkaji persoalan keterwakilan politik perempuan dari berbagai sudut pandang. Weeks & Masala (2023) menemukan bahwa kebijakan kuota gender di Eropa terbukti meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Selanjutnya, Sinpeng (2025) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada

dukungan partai politik dan struktur sistem pemilu yang terbuka bagi perempuan. Di Indonesia, Perdana & Hillman (2020) menunjukkan bahwa kuota perempuan belum berjalan efektif karena lemahnya komitmen partai dalam melakukan kaderisasi. Meski banyak penelitian telah dilakukan, sebagian besar masih menyoroti faktor-faktor sosial dan politik tanpa memetakan bagaimana arah dan perkembangan kajian tentang keterwakilan perempuan berubah dari waktu ke waktu.

Keterbatasan dalam memahami peta pengetahuan mengenai isu keterwakilan perempuan membuka peluang bagi penelitian yang lebih menyeluruh. Pendekatan bibliometrik dapat digunakan untuk menelusuri tren publikasi ilmiah, kolaborasi antar peneliti, serta tema-tema yang berkembang dalam studi tentang perempuan dan politik. Dengan cara ini, penelitian dapat mengungkap pola perkembangan pengetahuan ilmiah serta menemukan celah riset yang belum banyak dieksplorasi. Hasilnya diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi dasar bagi penguatan kebijakan publik yang lebih peka terhadap isu gender.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren penelitian mengenai keterwakilan politik perempuan dan kesetaraan gender selama periode 2014–2024. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi penulis dan institusi yang produktif, tema-tema dominan yang muncul, serta kontribusi penelitian terhadap tata kelola pemerintahan yang inklusif. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya wacana akademik mengenai peran perempuan dalam politik serta memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem politik yang berkeadilan gender.

METODE

Penelitian ini tidak memiliki lokasi fisik penelitian, melainkan menggunakan basis data *Scopus* sebagai sumber data utama dalam penelusuran publikasi ilmiah.

Pengambilan data dilakukan pada Oktober 2025 untuk memastikan cakupan publikasi terbaru yang relevan dengan isu keterwakilan politik perempuan dalam kesetaraan gender. *Scopus* dipilih karena memiliki jangkauan publikasi internasional yang luas dan indeksasi yang diakui secara akademik (Baas et al., 2020). Secara karakteristik, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perkembangan dan arah kajian ilmiah mengenai keterlibatan perempuan dalam ranah politik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui metode bibliometrik. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan pola produksi pengetahuan berdasarkan data publikasi yang terukur dan tervalidasi (Passas, 2024).

Populasi penelitian mencakup seluruh karya akademik dalam basis data *Scopus* yang membahas perempuan, politik, dan kesetaraan gender, sedangkan sampel dibatasi pada artikel jurnal berbahasa Inggris yang diterbitkan pada periode 2014–2024. Buku, artikel konferensi, dan editorial dikecualikan agar fokus analisis tetap pada publikasi yang telah melalui proses *peer review*. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui penelusuran metadata sekunder menggunakan fitur *advanced search* dengan kata kunci “*women political representation*” dan “*gender equality*”. Penerapan kata kunci dilakukan pada bagian judul, abstrak, dan kata kunci artikel untuk memperoleh hasil yang paling relevan. Data yang diperoleh kemudian diekspor dalam format CSV dan diseleksi kembali untuk menghilangkan duplikasi serta publikasi yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian, sehingga keandalan data tetap terjaga.

Proses analisis dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama berupa analisis deskriptif untuk mengidentifikasi perkembangan jumlah publikasi, distribusi negara, jurnal, serta penulis dan institusi yang paling produktif selama periode penelitian. Tahap kedua berupa analisis

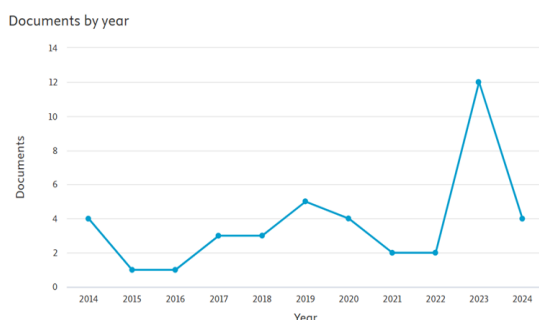
bibliometrik untuk memetakan pola hubungan dan pengaruh intelektual dalam literatur. Tiga teknik digunakan dalam tahap ini, yaitu: (1) *co-authorship* untuk mengamati pola kolaborasi antarpemulis dan antarnegara, (2) *co-occurrence* untuk menemukan tema penelitian melalui keterkaitan kata kunci, dan (3) *co-citation* untuk mengidentifikasi referensi yang paling berpengaruh dalam membentuk landasan teori pada bidang kajian ini.

Dalam proses penghitungan digunakan dua model analisis, yaitu *full counting* pada *co-authorship* dan *co-citation* untuk menunjukkan kontribusi penuh setiap penulis atau referensi, serta *binary counting* pada *co-occurrence* agar setiap kata kunci hanya dihitung satu kali dalam setiap dokumen sehingga pemetaan tema menjadi lebih proporsional. Seluruh proses analisis menghasilkan tiga jenis visualisasi melalui VOSviewer, yaitu *network visualization*, *overlay visualization*, dan *density visualization*. Hasil visualisasi tersebut kemudian ditafsirkan secara kualitatif untuk menjelaskan arah perkembangan riset serta implikasinya terhadap penguatan kebijakan kesetaraan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian berikut menyajikan hasil analisis secara sistematis, meliputi perkembangan tren publikasi, tingkat produktivitas jurnal dan penulis, pola kolaborasi antarpemulis maupun antarnegara, serta pemetaan tema-tema utama dalam penelitian.

Tren Publikasi



Sumber: Database Scopus (2025)

Gambar 1. Tren Publikasi dari 2014-2024

Gambar 1 menunjukkan bahwa publikasi ilmiah mengenai keterwakilan politik perempuan mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode 2014–2024. Jumlah publikasi menurun pada 2015–2016, kemudian meningkat kembali sejak 2017 dan mencapai lonjakan signifikan pada 2019. Setelah mengalami penurunan pada 2020–2022, publikasi kembali meningkat tajam pada 2023 sebagai titik tertinggi dalam satu dekade terakhir, sebelum menurun pada 2024 yang kemungkinan dipengaruhi oleh proses pengindeksan data yang belum sepenuhnya selesai.

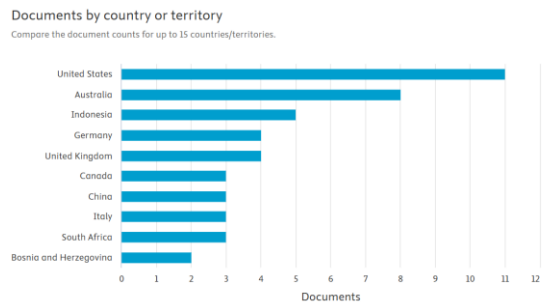
Peningkatan publikasi tersebut menunjukkan bahwa isu keterwakilan politik perempuan semakin memperoleh perhatian dalam diskursus akademik global. Pada awal periode, penelitian lebih banyak berfokus pada tingkat partisipasi dan representasi perempuan dalam lembaga politik. Namun, pada periode terbaru, kajian mulai bergeser ke arah yang lebih substantif, seperti pengaruh keterwakilan perempuan terhadap kualitas kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan penguatan demokrasi.

Temuan ini sejalan dengan Dahlerup (1988) yang menyatakan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan dapat mendorong perubahan budaya politik dan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif gender. Akan tetapi, hasil penelitian ini juga mendukung kritik Pitkin (1972) bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik belum tentu menghasilkan *substantive representation* apabila masih dibatasi oleh struktur politik dan budaya patriarki. Selain itu, meningkatnya penelitian pada periode terbaru juga dipengaruhi oleh berkembangnya kebijakan afirmatif, seperti penerapan *gender quota* di berbagai negara.

Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai keterwakilan

politik perempuan tidak lagi berfokus pada aspek kuantitatif semata, tetapi juga pada kontribusi substantif perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Kajian ini menjadi penting dalam mendukung penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif serta responsif terhadap kesetaraan gender.

Negara dengan Jumlah Publikasi Terbanyak



Sumber: Database Scopus (2025)

Gambar 2. Negara dengan Jumlah Publikasi Terbanyak

Berdasarkan visualisasi pada gambar 2, Amerika Serikat menempati posisi teratas sebagai negara dengan jumlah publikasi terbanyak, disusul Australia dan Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa negara dengan kapasitas riset dan sistem demokrasi yang mapan cenderung lebih aktif mengembangkan kajian mengenai keterwakilan politik perempuan dan kesetaraan gender.

Dominasi Amerika Serikat dan Australia menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan, budaya akademik, dan

pengarusutamaan gender berpengaruh terhadap produktivitas penelitian. Sementara itu, meningkatnya kontribusi Indonesia serta beberapa negara berkembang lainnya menunjukkan bahwa isu keterwakilan politik perempuan telah berkembang menjadi agenda penelitian global yang semakin luas dan tidak lagi hanya berpusat pada negara Barat.

Temuan ini sejalan dengan Hessami dan da Fonseca (2020) yang menyatakan bahwa negara dengan kapasitas riset yang kuat cenderung lebih aktif menghasilkan penelitian mengenai representasi perempuan dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, Bharti dan Ghose (2021) menjelaskan bahwa peningkatan penelitian di Asia dan Afrika berkaitan dengan evaluasi kebijakan kuota perempuan dan perluasan partisipasi perempuan dalam lembaga publik. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dominasi publikasi negara maju masih menyebabkan ketimpangan produksi pengetahuan, sehingga perspektif negara berkembang relatif belum banyak mendominasi diskursus akademik global.

Implikasi temuan ini menunjukkan pentingnya memperluas kolaborasi akademik dan dukungan penelitian di negara berkembang agar kajian mengenai keterwakilan politik perempuan menjadi lebih inklusif dan mampu merepresentasikan konteks sosial-politik yang lebih beragam.

Jurnal Paling Produktif

Tabel 1.

Jurnal Paling Produktif				
No	Nama Jurnal	Dokumen	Sitasi	Total Link Strength
1	<i>Asian Journal of Women's Studies</i>	2	11	1
2	<i>Representation</i>	1	14	2
3	<i>International Feminist Journal of Politics</i>	1	9	2
4	<i>Political Studies</i>	1	121	1
5	<i>Contemporary Politics</i>	1	27	1

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan Ms. Word (2025)

Berdasarkan tabel 1, *Asian Journal of Women's Studies* menjadi jurnal paling

produktif dengan dua dokumen, sedangkan *Representation*, *International Feminist Journal of Politics*, *Political Studies*, dan *Contemporary Politics* masing-masing memiliki satu dokumen. Dari sisi pengaruh ilmiah, *Political Studies* mencatat jumlah sitasi tertinggi, yaitu 121 sitasi, yang menunjukkan kontribusinya dalam pengembangan kajian representasi politik perempuan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa isu keterwakilan perempuan berkembang sebagai kajian multidisipliner yang menghubungkan politik, gender, dan tata kelola pemerintahan. Tingginya sitasi pada jurnal politik dan feminis menandakan bahwa penelitian mengenai representasi perempuan tidak lagi terbatas pada aspek partisipasi, tetapi juga pada pengaruh perempuan terhadap proses legislasi dan kebijakan publik.

Hasil ini sejalan dengan Kumari et al. (2023) yang menyatakan bahwa penelitian politik perempuan semakin mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi,

dan pemerintahan. Selain itu, Araujo & Tejedo-Romero (2016) menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dapat memperkuat transparansi dan kualitas tata kelola publik. Namun demikian, dominasi jurnal dari negara maju menunjukkan bahwa perspektif negara berkembang masih relatif terbatas dalam publikasi internasional. Penelitian di kawasan Asia cenderung lebih menekankan hubungan antara budaya, struktur sosial, dan partisipasi politik perempuan dibandingkan pendekatan institusional yang dominan di Barat.

Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa jurnal politik dan feminis memiliki peran penting dalam memperluas diskursus mengenai representasi substantif perempuan. Selain menjadi media publikasi, jurnal-jurnal tersebut juga berfungsi sebagai ruang pengembangan teori dan evaluasi kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Organisasi Paling Produktif

Tabel 2.
Institusi Paling Produktif

No	Organisasi	Dokumen	Sitasi	Total Link Strength
1	<i>Department of Government and International Relations, The University of Sydney, Sydney, Australia</i>	1	121	16
2	<i>Department of Political Science, Rutgers University–New Brunswick, New Brunswick, United States</i>	1	121	16
3	<i>John F. Kennedy School of Government, Cambridge, United States</i>	1	121	16
4	<i>Centre For Criminology And Criminal Justice, The University of Manchester, Manchester, United Kingdom</i>	1	24	12
5	<i>Department of Sociology, The Open University, Milton Keynes, United Kingdom</i>	1	24	12
6	<i>Universidad De Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spain</i>	1	55	10
7	<i>Universidade Do Minho, Braga, Portugal</i>	1	55	9
8	<i>International Water Management Institute (Iwmi), South Africa</i>	1	23	9

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan Ms. Word (2025)

Berdasarkan tabel 2, institusi dari Australia, Amerika Serikat, dan Inggris mendominasi publikasi mengenai keterwakilan politik perempuan. *Department of Government and*

International Relations, The University of Sydney, Department of Political Science Rutgers University–New Brunswick, dan *John F. Kennedy School of Government* memiliki jumlah sitasi tertinggi, masing-masing mencapai 121 sitasi dengan total

link strength sebesar 16. Temuan ini menunjukkan bahwa institusi tersebut memiliki pengaruh besar dalam pengembangan kajian gender dan representasi politik perempuan.

Dominasi institusi dari negara maju menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan, kapasitas riset, dan jejaring akademik internasional berperan penting dalam produktivitas penelitian. Kuatnya *link strength* mencerminkan intensitas kolaborasi akademik dan keterhubungan penelitian antar organisasi dalam membangun kajian politik perempuan secara global.

Temuan ini sejalan dengan Krook dan Mackay (2011) yang menyatakan bahwa institusi akademik dengan budaya inklusif dan dukungan terhadap kesetaraan gender cenderung lebih produktif dalam menghasilkan penelitian yang berdampak pada kebijakan publik. Selain itu, kontribusi lembaga dari Spanyol, Portugal,

dan Afrika Selatan mendukung pandangan Gradskova & Sanders (2015) bahwa konteks sosial dan budaya lokal turut memperkaya perspektif penelitian gender di tingkat global. Namun demikian, dominasi institusi Barat menunjukkan bahwa distribusi pengetahuan masih belum sepenuhnya merata karena institusi di negara berkembang masih menghadapi keterbatasan pendanaan, akses publikasi internasional, dan jejaring riset global.

Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa penguatan dukungan kelembagaan dan kolaborasi internasional menjadi faktor penting dalam pengembangan penelitian mengenai keterwakilan politik perempuan. Universitas dan lembaga riset tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi pengetahuan, tetapi juga berperan dalam mendorong pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender.

Penulis Paling Produktif

Tabel 3.
Penulis Paling Produktif

No	Nama Penulis	Jumlah Dokumen	Jumlah Sitasi	Total <i>Link Strength</i>
1	Nhamo, Godwell	1	23	18
2	Nhamo, Senia	1	23	18
3	Nhemachena, Charles	1	23	18
4	Acik, Necla	1	24	12
5	Erel, Umut	1	24	12
6	Araujo, Joaquim Filipe Ferraz Esteves	1	55	10
7	Tejedo-Romero, Francisca	1	55	10
8	Geys, Benny	1	28	8
9	Krook, Mona Lena	1	121	8
10	Norris, Pippa	1	121	8

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan Ms. Word (2025)

Berdasarkan tabel 3, Pippa Norris dan Mona Lena Krook menjadi penulis dengan jumlah sitasi tertinggi, masing-masing mencapai 121 sitasi dengan total *link strength* sebesar 8. Selain itu, Nhamo Godwell, Nhamo Senia, dan Nhemachena Charles memiliki tingkat keterhubungan tertinggi dengan nilai *link strength* sebesar 18. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa akademisi memiliki pengaruh

besar dalam pengembangan kajian mengenai representasi politik perempuan dan kesetaraan gender.

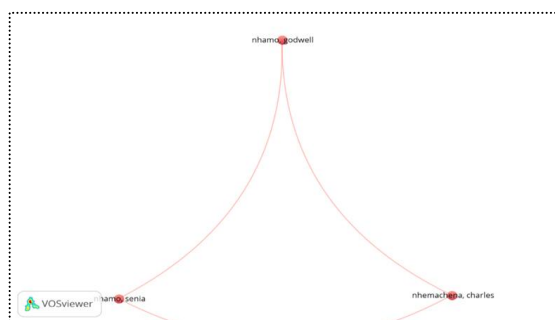
Tingginya jumlah sitasi dan keterhubungan antar pengarang menunjukkan bahwa studi politik perempuan berkembang melalui jejaring akademik yang kuat dan multidimensional. Norris dan Krook lebih banyak berkontribusi pada pengembangan teori

demokrasi, sistem pemilu, dan kebijakan kuota gender, sedangkan Araujo dan Tejedo-Romero menekankan hubungan antara representasi perempuan dan kualitas tata kelola pemerintahan. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa penelitian politik perempuan tidak hanya membahas aspek representasi formal, tetapi juga dampaknya terhadap kebijakan publik dan perubahan sosial.

Temuan ini sejalan dengan Childs dan Childs & Celis (2014) yang menyatakan bahwa jejaring kolaboratif lintas disiplin dan lintas negara berperan penting dalam memperluas perspektif penelitian gender. Selain itu, penelitian Norris dan Krook memperkuat pandangan bahwa representasi perempuan berkaitan erat dengan sistem politik dan efektivitas kebijakan afirmatif. Namun demikian, dominasi penulis dari negara maju menunjukkan bahwa produksi pengetahuan mengenai politik perempuan masih lebih banyak berpusat pada konteks demokrasi Barat, sehingga perspektif dari negara berkembang relatif belum terwakili secara seimbang.

Implikasi temuan ini menunjukkan pentingnya memperluas kolaborasi akademik dan meningkatkan kontribusi peneliti dari negara berkembang dalam studi politik perempuan. Penguatan jejaring riset internasional dapat memperkaya perspektif empiris serta menghasilkan kajian yang lebih inklusif terhadap dinamika sosial dan politik perempuan di berbagai kawasan.

Analisis Kolaborasi Antarpengarang



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan VosViewer (2025)

Gambar 3. Jaringan Kolaborasi Antarpengarang

Berdasarkan gambar 3, jejaring kolaborasi antarpengarang didominasi oleh kluster yang terdiri atas Nhamo Godwell, Nhamo Senia, dan Nhemachena Charles. Ketiganya memiliki hubungan kolaboratif paling kuat, yang menunjukkan intensitas kerja sama dalam penelitian mengenai pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik, dan isu sosial inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa kajian keterwakilan politik perempuan berkembang melalui pola penelitian kolaboratif dan lintas disiplin.

Kolaborasi antar pengarang menunjukkan pentingnya jejaring akademik dalam memperkuat kualitas dan produktivitas penelitian. Glänzel & Schubert (2005) menjelaskan bahwa tingginya tingkat kolaborasi menandakan kematangan suatu bidang ilmu karena memungkinkan pertukaran metodologi, teori, dan perspektif yang lebih luas. Dalam studi politik perempuan, kolaborasi ilmiah membantu memperkaya analisis mengenai representasi gender dalam berbagai konteks sosial dan politik.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa kerja sama lintas negara dan lintas disiplin semakin penting dalam penelitian gender dan politik. Sejalan dengan teori *knowledge network* dari Powell & Grodal (2005), jejaring akademik berfungsi sebagai sarana pertukaran pengetahuan dan inovasi ilmiah yang dapat memperluas dampak penelitian. Namun demikian, hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebagian penulis masih berada dalam jaringan kolaborasi yang terbatas dan belum terhubung secara luas dengan komunitas akademik global.

Kondisi tersebut sejalan dengan (Bharti & Ghose (2021) yang menyebutkan bahwa peneliti dari negara berkembang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap publikasi internasional, pendanaan riset, dan jejaring akademik global. Akibatnya, perspektif dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin belum sepenuhnya terwakili dalam

diskursus global mengenai politik perempuan.

Secara gamblang, analisis kolaborasi antar penulis menunjukkan bahwa perkembangan studi keterwakilan politik perempuan sangat dipengaruhi oleh kekuatan jejaring akademik. Kolaborasi yang luas tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga memperkuat pertukaran pengetahuan dan menghasilkan kajian yang lebih inklusif dalam memahami isu kesetaraan gender di berbagai negara.

Analisis Kolaborasi Antarnegara



VOSviewer

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan VosViewer (2025)

Gambar 4. Jaringan Kolaborasi Antarnegara

Berdasarkan gambar 4, jaringan kolaborasi penelitian didominasi oleh Australia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan yang menjadi pusat keterhubungan dengan negara lain seperti Indonesia, Kanada, dan China. Posisi Australia yang cukup sentral menunjukkan perannya sebagai penghubung dalam pertukaran pengetahuan lintas kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai keterwakilan politik perempuan berkembang melalui kerja sama internasional yang semakin luas.

Kolaborasi antarnegara menunjukkan adanya integrasi perspektif dalam membahas isu representasi perempuan, demokrasi, dan kebijakan publik. Kerja sama lintas negara memungkinkan penggabungan konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda sehingga menghasilkan pendekatan

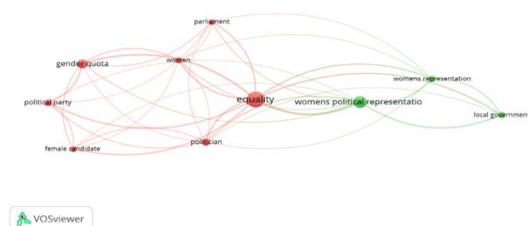
penelitian yang lebih komprehensif dan inklusif terhadap isu kesetaraan gender.

Temuan ini sejalan dengan Samuel *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa kolaborasi internasional dapat memperkaya kualitas penelitian melalui pertukaran perspektif lintas wilayah. Selain itu, Tian & Bu (2024) menegaskan bahwa keterlibatan akademisi dari negara berkembang penting untuk memperluas representasi perspektif dalam penelitian global. Namun demikian, hasil visualisasi masih menunjukkan dominasi negara dengan kapasitas riset yang kuat, sehingga produksi pengetahuan mengenai politik perempuan belum sepenuhnya seimbang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam akses pendanaan, publikasi internasional, dan jejaring akademik global. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi lintas kawasan diperlukan agar penelitian mengenai kesetaraan gender menjadi lebih inklusif dan mampu menghadirkan pengalaman sosial-politik yang lebih beragam.

Secara gamblang, analisis kolaborasi antarnegara menegaskan bahwa penelitian tentang keterwakilan politik perempuan telah berkembang menjadi jaringan riset global yang saling terhubung. Kolaborasi internasional tidak hanya memperkuat pertukaran pengetahuan akademik, tetapi juga mendukung pengembangan kebijakan publik yang lebih demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap isu gender.

Analisis Kata Kunci



VOSviewer

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan VosViewer (2025)

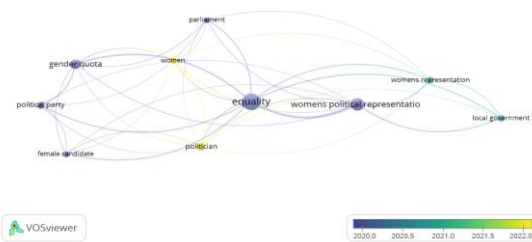
Gambar 5. Kata Kunci yang Sering Muncul Menggunakan Network Visualization

Berdasarkan gambar 5, hasil *network visualization* menunjukkan dua kluster utama dalam penelitian keterwakilan politik perempuan. Kluster pertama memuat istilah seperti *equality*, *gender quota*, *political party*, *female candidate*, *women*, dan *parliament* yang berfokus pada representasi politik dan kebijakan afirmatif. Sementara itu, kluster kedua mencakup *women's political representation*, *women's representation*, dan *local government* yang menekankan keterlibatan perempuan dalam praktik pemerintahan, terutama di tingkat lokal.

Keterhubungan antar istilah menunjukkan bahwa penelitian tidak lagi hanya membahas jumlah keterwakilan perempuan, tetapi juga pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan dan tata kelola publik. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa perempuan mulai dipahami sebagai aktor substantif dalam demokrasi dan pemerintahan.

Temuan ini sejalan dengan Pitkin, (1972) yang membedakan representasi perempuan ke dalam *descriptive representation* dan *substantive representation*. Selain itu, Rai (2017) menegaskan bahwa kesetaraan gender perlu diwujudkan melalui keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar kehadiran simbolik dalam lembaga politik.

Secara gamblang, *network visualization* menunjukkan bahwa kajian keterwakilan politik perempuan berkembang menuju pendekatan yang lebih transformatif dengan fokus pada pengaruh perempuan terhadap demokrasi, partisipasi politik, dan kebijakan publik yang responsif gender.



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan VosViewer (2025)

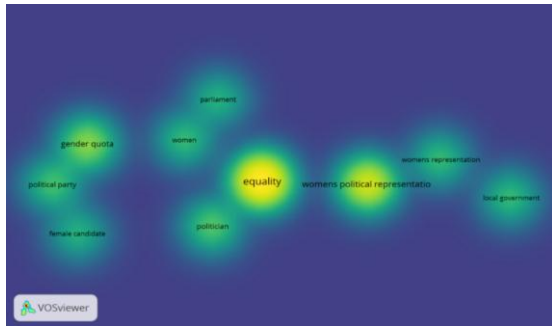
Gambar 6. Kata Kunci yang Sering Muncul Menggunakan Overlay Visualization

Berdasarkan gambar 6, *overlay visualization* memperlihatkan perkembangan tema penelitian berdasarkan dimensi waktu. Istilah seperti *gender quota*, *women*, dan *politician* muncul lebih dominan pada periode 2020–2022, sedangkan istilah seperti *equality*, *political representation*, dan *local government* muncul lebih awal dan menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari pembahasan konseptual menuju analisis kebijakan afirmatif dan dampak representasi perempuan terhadap kebijakan publik. Penelitian terbaru juga mulai menyoroti kualitas keterlibatan perempuan dalam proses legislasi dan tata kelola pemerintahan.

Temuan ini mendukung pandangan Dahlerup (1988) yang menyatakan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan dapat memengaruhi budaya politik dan menghasilkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu gender. Berbeda dengan penelitian awal yang berfokus pada jumlah representasi, penelitian terkini lebih menekankan efektivitas kebijakan kuota dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara gamblang, *overlay visualization* menunjukkan bahwa penelitian keterwakilan politik perempuan berkembang menuju pendekatan yang lebih analitis dan berorientasi pada dampak kebijakan serta perubahan sosial.



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan VosViewer (2025)

Gambar 7. Kata Kunci yang Sering Muncul Menggunakan *Density Visualization*

Berdasarkan gambar 7, *density visualization* menunjukkan bahwa istilah *equality* dan *women's political representation* memiliki tingkat kepadatan tertinggi sehingga menjadi fokus utama dalam literatur penelitian. Istilah seperti *gender quota*, *politician*, dan *parliament* juga cukup dominan, yang menunjukkan tingginya perhatian terhadap kebijakan afirmatif dan representasi perempuan dalam lembaga legislatif.

Sebaliknya, istilah seperti *local government*, *female candidate*, dan *political party* memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu partisipasi perempuan di tingkat lokal dan dinamika pencalonan politik perempuan masih relatif kurang dikaji dibandingkan tema representasi di tingkat nasional.

Temuan ini sejalan dengan Ara & Northcote (2020) yang menyatakan bahwa hambatan struktural dan budaya patriarki di tingkat lokal sering kali lebih kompleks dibandingkan tingkat nasional. Selain itu, Bharti & Ghose (2021) menilai bahwa penelitian gender masih cenderung berfokus pada konteks negara maju dan isu makro sehingga kajian pada konteks lokal dan negara berkembang masih terbatas.

Secara gamblang, *density visualization* menunjukkan bahwa penelitian keterwakilan politik perempuan telah berkembang cukup matang, tetapi masih memiliki peluang pengembangan pada isu pemerintahan lokal, dinamika

partai politik, dan praktik representasi substantif perempuan di tingkat daerah.

Analisis *Co-Citation*



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan VosViewer (2025)

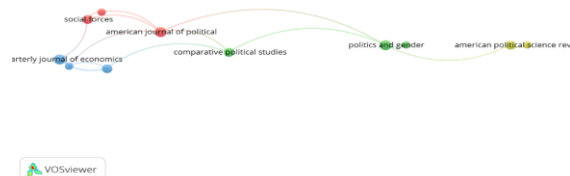
Gambar 8. Analisis *Co-Citation* Berdasarkan Referensi

Berdasarkan gambar 8, penelitian mengenai keterwakilan politik perempuan banyak merujuk pada karya Barnes, Baltrunaite, Bush, Beer, dan Aspinall. Kepadatan hubungan sitasi antarpengarang menunjukkan adanya keterkaitan antara teori normatif, penelitian empiris, dan kajian kebijakan dalam membangun fondasi studi politik perempuan.

Keterhubungan tersebut menunjukkan bahwa penelitian politik perempuan berkembang dari pembahasan representasi simbolik menuju analisis mengenai pengaruh perempuan terhadap kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan inklusi sosial. Kajian yang muncul tidak hanya membahas jumlah keterwakilan perempuan, tetapi juga efektivitas representasi dalam proses politik.

Temuan ini sejalan dengan Barnes & O'Brien yang menekankan bahwa representasi perempuan memiliki dampak substantif terhadap kebijakan publik dan inklusi sosial. Baltrunaite juga menunjukkan bahwa kebijakan kuota gender dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Berbeda dengan pendekatan universalistik, Aspinall menghadirkan perspektif kontekstual di Asia Tenggara dengan menyoroti hambatan budaya patriarki dan struktur politik lokal terhadap representasi perempuan.

Secara gamblang, analisis *co-citation* berdasarkan referensi menunjukkan bahwa studi politik perempuan berkembang menuju pendekatan yang lebih empiris, kontekstual, dan berorientasi pada evaluasi kebijakan publik.



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan VosViewer (2025)

Gambar 9. Analisis Co-Citation Berdasarkan Sumber

Berdasarkan gambar 9, jurnal seperti *American Political Science Review*, *Politics & Gender*, *Comparative Political Studies*, *American Journal of Political Science*, *Social Forces*, dan *Quarterly Journal of Economics* menjadi rujukan utama dalam penelitian keterwakilan politik perempuan.

Dominasi jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa isu gender telah menjadi bagian penting dalam kajian politik, sosiologi, dan ekonomi. Penelitian tidak lagi terbatas pada pembahasan representasi perempuan secara deskriptif, tetapi juga mengarah pada analisis dampak representasi perempuan terhadap demokrasi, kebijakan publik, dan kesejahteraan sosial.

Temuan ini memperlihatkan perkembangan kajian yang semakin multidisipliner. *Politics & Gender* dan *Comparative Political Studies* lebih banyak membahas sistem pemilu dan kebijakan kuota, sedangkan *Social Forces* dan *American Journal of Political Science* menyoroti faktor sosial-ekonomi dalam partisipasi politik perempuan. Sementara itu, *Quarterly Journal of Economics* memperluas kajian melalui pendekatan ekonomi politik terkait kesejahteraan dan pembangunan sosial.

Secara gamblang, analisis *co-citation* berdasarkan sumber menunjukkan bahwa studi politik perempuan berkembang secara multidisipliner dan semakin berorientasi pada evaluasi dampak representasi perempuan terhadap tata kelola dan keadilan sosial.



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan VosViewer (2025)

Gambar 10. Analisis Co-Citation Berdasarkan Penulis

Berdasarkan gambar 10, Berry, Barnes, Bolzendahl, Alexander, Beaman, dan Besley memiliki posisi penting dalam membentuk arah penelitian mengenai politik perempuan. Tingginya keterhubungan sitasi menunjukkan bahwa karya mereka menjadi rujukan utama dalam memahami hubungan antara gender, kekuasaan, dan representasi politik.

Keterhubungan tersebut menunjukkan bahwa penelitian politik perempuan berkembang melalui kombinasi pendekatan struktural, sosial, dan kebijakan. Kajian tidak lagi hanya menyoroti keterwakilan numerik perempuan, tetapi juga faktor institusional dan sosial yang memengaruhi partisipasi politik perempuan.

Temuan ini memperlihatkan perbedaan fokus antarpengarang. Berry dan Barnes menekankan pentingnya modal sosial dan dukungan institusional, sedangkan Bolzendahl dan Alexander lebih menyoroti pengaruh sistem pemilu dan kebijakan afirmatif terhadap peluang perempuan dalam politik. Sementara itu, Beaman dan Besley menilai bahwa kehadiran perempuan dalam posisi strategis dapat memengaruhi orientasi

kebijakan dan persepsi sosial terhadap kepemimpinan perempuan.

Secara gamblang, analisis *co-citation* berdasarkan penulis menunjukkan bahwa studi keterwakilan politik perempuan telah memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat serta berkembang menuju analisis yang lebih kritis terhadap distribusi kekuasaan, efektivitas kebijakan, dan perubahan sosial dalam sistem politik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai keterwakilan politik perempuan dan kesetaraan gender mengalami perkembangan signifikan selama periode 2014–2024. Peningkatan jumlah publikasi memperlihatkan semakin besarnya perhatian akademik terhadap isu politik perempuan, dengan fokus penelitian yang bergeser dari representasi simbolik menuju representasi substantif dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil bibliometrik juga menunjukkan bahwa negara maju masih mendominasi produksi penelitian, tetapi kontribusi negara berkembang semakin meningkat melalui kajian empiris mengenai kebijakan afirmatif, partisipasi politik, dan dinamika sosial-politik perempuan. Selain itu, analisis kata kunci dan *co-citation* menegaskan bahwa penelitian politik perempuan berkembang ke arah yang lebih multidisipliner dan berorientasi pada dampak kebijakan publik.

Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan dukungan kelembagaan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Partai politik, pemerintah, dan lembaga pendidikan perlu memperluas akses perempuan terhadap pendidikan politik, pengembangan kepemimpinan, serta mekanisme rekrutmen yang lebih inklusif. Dengan demikian, keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi indikator kehadiran dalam lembaga politik, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan berkeadilan gender.

REFERENSI

- Ara, F., & Northcote, J. (2020). Women's Participation in Bangladesh Politics, The Gender Wall and Quotas. *South Asia Research*, 40(2), 266–281. <https://doi.org/10.1177/0262728020915562>
- Araujo, J. F. F. E., & Tejedo-Romero, F. (2016). Women's political representation and transparency in local governance. *Local Government Studies*, 42(6), 885–906. <https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1194266>
- Baas, J., Schotten, M., Plume, A., Côté, G., & Karimi, R. (2020). Scopus as a curated, high-quality bibliometric data source for academic research in quantitative science studies. *Quantitative Science Studies*, 1(1), 377–386. https://doi.org/10.1162/qss_a_00019
- Bharti, P., & Ghose, D. S. (2021). Achieving gender equality through electoral participation of women: A case study of 2005, 2010 and 2015 assembly elections in Patna (India). *Geography, Environment, Sustainability*, 14(1), 132–141. <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2020-168>
- Childs, S. L., & Celis, K. (2014). *Gender, Conservatism and Political Representation* (S. L. Childs & K. Celis (eds.)). European Consortium for Political Research (ECPR).
- Currie-Wood, R., & Pruysers, S. (2025). Putting their money where their mouth is: The gendered dynamics of central party financial transfers to local election candidates. *Party Politics*, 31(1), 176–186. <https://doi.org/10.1177/13540688231208897>
- Dahlerup, D. (1988). From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics. *Scandinavian Political Studies*, 11(4), 275–298. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.1988.tb00372.x>
- Darbaidze, E., & Niparishvili, T. (2024). Women's Organizations of Political Parties: Contemporary Challenges and Realities in Georgia. *Demokratizatsiya*, 32(2), 165–180. <https://doi.org/10.53483/EWSL6493>
- Eduardo, M. C., & Souza, J. I. L. de. (2021). Quando o pouco não chega a muitas: análise inicial da distribuição dos recursos públicos de campanha para a câmara dos deputados em 2018 no Brasil. *Ex Aequo - Revista Da Associação Portuguesa de Estudos Sobre as Mulheres*, 44, 39–56. <https://doi.org/10.22355/exaequo.2021.44.04>
- Glänzel, W., & Schubert, A. (2005). Handbook of Quantitative Science and Technology Research. *Handbook of Quantitative Science and Technology Research*, January. <https://doi.org/10.1007/1-4020-2755-9>

- Gradszkova, Y., & Sanders, S. (2015). Institutionalizing Gender Equality: Historical and Global Perspectives. In *Institutionalizing Gender Equality: Historical and Global Perspectives*. Bloomsbury Publishing Plc. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105012669622&partnerID=40&md5=1ee145ac2bd7c8cabd7207dcd6052670>
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemerintah Republik Indonesia.
- Holman, M. R., & Mahoney, A. (2018). Stop, Collaborate, and Listen: Women's Collaboration in US State Legislatures. *Legislative Studies Quarterly*, 43(2), 179–206. <https://doi.org/10.1111/lsq.12199>
- Kumari, S., Nanduri, S., Sharma, H., & Batar, S. (2023). Women in politics: examining their impact on policy development — A comprehensive review. *Multidisciplinary Reviews*, 6(3). <https://doi.org/10.31893/MULTIREV.2023S S034>
- Mackay, F. (2011). Gender, Politics and Institutions. *Gender, Politics and Institutions*, June. <https://doi.org/10.1057/9780230303911>
- Passas, I. (2024). Bibliometric Analysis: The Main Steps. *Encyclopedia*, 4(2), 0. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia4020065>
- Perdana, A., & Hillman, B. (2020). Quotas and ballots: The impact of positive action policies on women's representation in Indonesia. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 7(2), 158–170. <https://doi.org/10.1002/app5.299>
- Pitkin, H. (1972). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Powell, W., & Grodal, S. (2005). Network of innovators. In *Practice Nursing* (Vol. 16, Issue 9, pp. 420–423). <https://doi.org/10.12968/pnur.2005.16.9.19672>
- Rai, S. M. (2017). Institutional mechanisms for the advancement of women: Mainstreaming gender, democratizing the state? In *Mainstreaming Gender, Democratizing the State: Institutional Mechanisms for the Advancement of Women* (pp. 15–23). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203786680-1>
- Reeves, A., Brown, C., & Hanefeld, J. (2022). Female political representation and the gender health gap: a cross-national analysis of 49 European countries. *European Journal of Public Health*, 32(5), 684–689. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac122>
- Rustagi, N., Opoku, E. E. O., & Acheampong, A. O. (2024). Does gender diversity in politics improve access to electricity and electrification inequality? A global analysis. *Energy Economics*, 131(March 2023), 107399. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107399>
- Samuel, H. S., Etim, E. E., & Nweke-Maraizu, U. (2024). International Research Collaboration: Best Practices and Strategies for Success. *Building Organizational Capacity and Strategic Management in Academia*, November, 307–320. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6967-8.ch011>
- Sibarani, R. E. H. (2024). A Comparison Study of the Quotas and Conditions for Women's Representation in Parliament in Indonesia, Timor-Leste, and Finland. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v3n2.2>
- Sinpeng, A. (2025). Persisting Patronage: Challenges to Breaking Gender Barriers in Thai Elections. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 44(2 Special Issue: Thailand's 2023 Election: A Liberal Moment in a Competitive Authoritarian System), 270–291. <https://doi.org/10.1177/18681034251355639>
- Tian, Y., & Bu, Y. (2024). Developed Countries Dominate Leading Roles in International Scientific Collaborations: Evidence from Scholars' Self-Reported Contribution in Publications. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 61(1), 1104–1106. <https://doi.org/10.1002/pra2.1199>
- Weeks, A. C., & Masala, F. (2023). Still “the Domain of Men?” Gender Quotas and Women's Inclusion in Local Politics in Italy. *Legislative Studies Quarterly*, 48(3), 503–534. <https://doi.org/10.1111/lsq.12405>
- Yusartika, P., Hasanuddin, T., & Ranga, K. K. (2023). The role and participation of women in political development in Indonesia. *AIP Conference Proceedings*, 2621(1), 50010. <https://doi.org/10.1063/5.0142621>